**PENGAWASAN LANGSUNG DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
TERHADAP IZIN ANGKUTAN ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI
(AJDP) TAHUN 2018**

Oleh : Reni Angriani

Email : reniangriani27772@gmail.com

Pembimbing : Drs. Tiyas Tinov, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru

28293-

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The Pekanbaru City Transportation Agency is a government agency that has the task and function of supervision in the field of Shuttle Transportation within the Province (AJDP) operating in Pekanbaru City. A supervisory role is needed to ensure Transportation within the Province (AJDP) operates in Pekanbaru City in accordance with applicable regulations, thereby ensuring the safety and safety of the people who use these transportation services. This happens because there is still a lack of supervision conducted by the Pekanbaru City Transportation Department. The formulation of the problem in this study is how the supervision of the Pekanbaru City Transportation Department Against 2018 Provincial Transportation and Shuttle (AJDP) and what are the inhibiting factors that affect the supervision of the Pekanbaru City Transportation Department.

The purpose of this study was to determine the direct supervision of the Pekanbaru City Transportation Department of the 2018 Provincial Shuttle Transportation Permit (AJDP) and the inhibiting factors that influence the supervision.

The concept of the theory that I use for the supervisory function according to Brantas and the concept of Transportation theory according to Adisasmita. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. In collecting data, the writer uses interview and documentation techniques.

The results of the author's research are the supervision of the Pekanbaru City Transportation Department Against 2018 (AJDP) Transportation within the Province (AJDP). This can be seen from the large number of Transportation within the Province (AJDP) operating in Pekanbaru City which do not have route licenses. The factors that influence this supervision are the condition of Human Resources in the Pekanbaru City Transportation Department. The second factor is the lack of coordination between personnel who served in the supervision section of the Pekanbaru City Transportation Department. The next factor is the lack of community participation in providing information and cooperation to related agencies.

Keywords: supervision, Transportation within the Province (AJDP), Licensing

A. PENDAHULUAN

A1. Latar Belakang

Kota Pekanbaru saat ini merupakan kota yang mengarah kepada kota metropolitan dengan berbagai akses pembangunan serta fasilitas yang semakin berkembang. Tentunya hal tersebut akan menambah jumlah penduduk yang berada di Kota Pekanbaru, sesuai dengan Visi Misi Kota Pekanbaru saat ini adalah “*Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan taqwa*”. Untuk menuju kota metropolitan pemerintah Kota Pekanbaru diharapkan mampu dan tanggap dalam melaksanakan tindakan untuk mencegah terhadap permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru yaitu salah satunya adalah travel ilegal.

Menurut Manullang dalam pelaksanaa tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) di Kota Pekanbaru, maka juga sangat dibutuhkan pengawasan yang meningkat dari pemerintah, tentu dalam hal ini adalah pengawasan rutin. Maka sangat jelaslah bahwa dengan admininstrasi dan managemen yang baik segala usaha dapat dicapai dengan baik. Apabila tidak demikian kemungkinan tujuan tidak akan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh karenanya dengan pemberian motivasi yang terarah dari pimpinan akan mengembangkan segenap daya dan potensi yang dimiliki untuk bisa digunakan semaksimal mungkin dalam perwujudan tujuan organisasi.

Untuk mengatur dan mengurus permasalahan travel ilegal ini, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai implementer kebijakan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan raya sesuai dengan

Undang - Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Pasal 1 Ayat 21 menyatakan Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang dengan kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dijelaskan bahwa angkutan sewa merupakan pelayanan angkutan sewa memiliki ciri-ciri pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas. Oleh karena itu setiap angkutan sewa yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan / persyaratan yang berlaku. Setiap penguasa angkutan umum yang tidak memenuhi peraturan atau surat izin akan dikenakan sanksi berupa tilang dan mobil yang bersangkutan akan ditahan sampai waktu persidangan selesai.

Adapun sanksi yang berdasarkan pasal 308 yaitu : “ Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang tidak memenuhi peraturan dan menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 22 Pasal 173 Ayat 1.

Pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, pada pasal 33 yaitu : Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administrasi
- c. Pembekuan izin
- d. Pencabutan izin

Pengawasan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dilakukan oleh seksi pengawasan lalu lintas jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, adapun yang diawasi adalah Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP)

yang beroperasi di Kota Pekanbaru tidak memiliki izin trayek. Adapun bagian di Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan diantaranya:

1. Kepala Bidang Pengawasan Lalu Lintas Jalan
2. Penyidik Lapangan

Seksi tersebut merupakan pihak yang mengawasi dengan cakupan Kota Pekanbaru, maka tingkat keberhasilan seksi ini sangat berpengaruh terhadap Pengawasan yang menjadi tugas Bidang Pengawasan Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

A2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengawasan langsung Dinas Perhubungan kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tahun 2018 ?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pengawasan langsung Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tahun 2018 ?

A3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan Pengawasan Langsung Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tahun 2018
2. Mendeskripsikan faktor penghambat Pengawasan Langsung Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tahun 2018

A4. Kerangka Teori

Pengawasan

Menurut Strong dalam Brantas menjelaskan bahwa pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan, agar suatu pelaksanaan sesuai

dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Menurut Brantas pengawasan adalah meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenaan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Dalam hal ini pengawasan juga berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antara kegiatan.

Selanjutnya Brantas menjelaskan bahwa tujuan pengawasan adalah :

- a. Suatu proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviasi*).
- c. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya.
- d. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- e. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
- f. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
- g. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi.
- h. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
- i. Memberikan opini kinerja organisasi.

- j. Menggerakkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
 - k. Menciptakan terwujudnya pemerintah yang bersih.
Menurut Hasibuan sifat dan waktu pengawasan adalah sebagai berikut :
1. *Repressive Control* adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. Dalam hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Membandingkan hasil dengan rencana.
 - b. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan melakukan tindakan perbaikan.
 - c. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya. Jika perlu dikenakan sanksi dan hukuman kepadanya.
 - d. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - e. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat petugas pelaksana.
 - f. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.
2. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
 3. Pengawasan berkala adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya perbulan, persemester dan lain-lain.
 4. Pengawasan mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau

peraturan-peraturan yang ada telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-kali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

5. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah yang dilakukan secara *integretife* melalui dari sebelum pada saat dan sesudah kegiatan operasional dilakukan

Transportasi

Menurut Adisasmita pengertian transportasi dapat diartikan sebagai kegiatan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Dalam kegiatan transportasi diperlukan empat komponen yaitu :

1. Terjadinya muatan yang diangkut
2. Terdapat kendaraan sebagai sarana angkutan
3. Adanya jalan yang dapat dilalui
4. Tersedia terminal

Dalam buku manajemen transportasi menurut Abbas Salim adalah:

1. Pengertian Transportasi

Transportasi adalah kegiatan memindahkan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dalam hal ini transportasi terlihat ada dua unsur yang terpenting yaitu:

- a. Pemindahan/pergerakan (*movement*).
- b. Secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ketempat lain.

Dalam transportasi dapat dilihat dua kategori yaitu :

- a. Pertama, pemindahan bahan-bahan dan hasil-hasil produksi dengan menggunakan alat angkut.
- b. Kedua, mengangkat penumpang dari suatu tempat ketempat lain.
2. Pembagian fungsi transportasi
 - a. Angkutan penumpang yaitu untuk pengangkutan penumpang

menggunakan mobil/kendaraan pribadi dan alat angkut lainnya.

- b. Selain mobil yang diinginkan untuk mengangkat penumpang digunakan pula kendaraan untuk angkutan umum seperti bis, pesawat udara, kereta api, kapal laut, kapal penyebrangan dan pelayanan samudra luar negeri.

3. Kerangka sistem transportasi

Transportasi adalah ilmu yang menggunakan banyak kaitannya dengan ilmu-ilmu lain seperti manajemen, pemasaran, pembangunan, ekonomi, UU dan kebijaksanaan pemerintah.

4. Perencanaan transportasi

Perencanaan transportasi yaitu merencanakan secara menyeluruh mengenai system transportasi terpadu yang merupakan *intermode transportation system*. Perencanaan menyangkut angkutan jalan raya, angkutan laut dan angkutan udara dan berbagai moda transportasi yang ada pada urban area (pinggiran kota).

Menurut Abbas manajemen angkutan/lalu lintas adalah :

1. Defenisi : pengangkutan penumpang dan muatan dengan alat angkutan dari satu tempat ke tempat lain.
2. Angkutan penunpan dapat dilihat dari beberapa segi yaitu :
 - a. Pengangkutan penumpang antarkota dengan kendaraan.
 - b. Alat pengangkutan yang digunakan adalah: Mini bus, mobil sedan.
 - c. Selain daripada itu pengangkutan penumpang penyebrangan secara geografis.

Menurut Kamaludin transportasi berasal dari bahasa latin yaitu *transportare*, dari kata *trans* berarti seberang atau sebelah lain dan *portare* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa sesuatu kesebelah lain atau dari suatu tempat ke

tempat lainnya. Ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan guna menolong.

A5. Metode Penelitian

Pendekekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut *Denzin dan Lincoln* (1987), Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Kemudian jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Menurut *Whitney* (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan menggunakan interpretasi yang tepat

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B1. Pengawasan Langsung Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tahun 2018

1. Pemberian Pedoman Pengawasan

Adapun tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomo Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
- b. Tanda lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
- c. Fisik kendaraan bermotor;
- d. Daya angkutan dan/atau cara pengangkutn barang dan/atau

e. Izin penyelenggaraan angkutan.
Selanjutnya pasal 8 yang mengatakan :

- 1) Pemeriksaan dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi pemekrisaan atas dokumen perizinan dan dokumen angkutan orang atau angkutan barang yang diwajibkan dalam izin.
- 2) Pemekrisaan atas dokumen perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - b. Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek;
 - c. Dokumen perizinan penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat.
- 3) Pemeriksaan atas dokumen angkutan orang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tiket penumpang umum
 - b. Tanda pengenalan bagasi
 - c. Manifes
- 4) Pemeriksaan atas dokumen angkutan barang yang diwajibkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat perjanjian pengangkutan, dan
 - b. Surat muatan barang.

Dan pada pasal 13 ayat 3 pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa adanya peningkatan :

- a. Angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan;
- b. Angka kejahatan yang menyangkut kendaraan
- c. Jumlah kendaraan yang tidak memenuhi syarat teknis dan persyaratan layak jalan;
- d. Ketidak taatan pemilik dan/atau pengusaha angkutan umum

melakukan pengujian kendaraan pada waktunya;

- e. Pelanggaran perizinan angkutan umum dan/atau;
- f. Pelanggaran kelebihan muatan angkutan barang.

Namun pemberian izin angkutan penumpang berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Keputusan Menteri Perubungan No 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum, persyaratan yang harus dipenuhi untuk trayek dan teratur adalah memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek yaitu :

- 1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha angkutan :
 - a. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akta pendirian koperasi bagi pemohon berbentuk koperasi dan tanda kependudukan untuk pemohon perorangan
 - c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk memiliki atau menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor untuk pemohon yang berdomisili di pulau Jawa, Sumatera dan Bali;
 - e. Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- 2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin trayek terdiri dari persyaratan administratif dan teknis, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Administratif
1. Memiliki izin usaha angkutan
 2. Mendatangi surat persyaratan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek
 3. Memiliki atau menguasai kendaraan yang laik jalan dibuktikan dengan fotokopi STNK sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Bukti Uji Kendaraan.
 4. Menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai kepemilikan dan penguasaan
 5. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraan untuk tetap dalam kondisi laik jalan
 6. Surat keterangan kondisi usaha seperti permodalan dan sumber daya manusia
 7. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan.
 8. Surat pertimbangan dari Gubernur, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- a. Persyaratan Teknis
1. Pada trayek yang dimohon masih dimungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan
 2. Prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang

mampu memberikan pelayanan angkutan terbaik.

Standar pelayanan minimal Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) meliputi :

- a. Keamanan
- b. Keselamatan
- c. Kenyamanan
- d. Keterjangkauan
- e. Kesetaraan
- f. Keteraturan

2. Pengawasan Berkala

Untuk titik razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan menurut data yang peneliti dapatkan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang peneliti rangkum seperti dibawah ini :

Tabel 3.3
Data jadwal razia berkala yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018

No	Bulan	Titik Razia
1	Januari	Muara Fajar
2	Februari	Garuda Sakti KM 21
3	Maret	Arengka Pasar Pagi
4	Apri	Perbatasan Pekanbaru dan Kampar
5	Mei	Garuda Sakti
6	Juni	Arengka Pasar Pagi
7	Juli	Muara Fajar
8	Agustus	Muara Fajar
9	September	Perbatasan Pekanbaru dan Kampar
10	Oktober	Perbatasan Pekanbaru dan Kampar
11	November	Garuda Sakti KM 21

12	Desember	Arengka Pasar Pagi
----	----------	--------------------

(Sumber : Data Olahan Penulis, 2018)

3. Sanksi

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari apa yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) berdasarkan ketidaksesuaian kegiatan atau prosedur maka bisa dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera kepada pemilik jasa agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan melanggar selanjutnya.

Penetapan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran angkutan antar jemput dalam provinsi yang melakukan kesalahan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi yang dikenakan berupa teguran, tilang dan denda dengan jumlah uang yang ditetapkan dalam pedoman pengawasan dan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan antar jemput dalam provinsi.

B2. Faktor-faktor penghambat Pengawasan Langsung Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) Tahun 2018

1. Sumber Daya Manusia

Personil pengawas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hanya berjumlah 8 orang, dilihat dari jumlah Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang tidak memiliki izin trayek

semakin berkembang dan jumlah personil yang terbatas memang mempengaruhi pencapaian hasil kerja yang baik. Sehingga faktor kekurangan jumlah personil menjadi kendala tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan.

Namun setiap instansi memiliki hal yang mendasar bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan, apabila suatu instansi mengalami kekurangan sumber daya manusia yang berkopoten dibidangnya atau tidak sebanding personil yang bertugas dengan jumlah pekerjaan yang dikerjain akan memungkinkan pekerjaan yang dikerjakan hasilnya akan kurang baik atau kurang maksimal dalam melakukan pengawasan.

2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses dalam mengintegritaskan seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau bagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Koordinasi yang dimaksud adalah menyelaraskan tugas atau pekerjaan dengan cara dihubungkan satu sama lain melalui komunikasi yang baik, koordinasi itu sendiri termasuk yang memegang peranan penting didalam menjalankan proses pengawasan pada permasalahan di dalam penelitian ini dan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan di titik dan waktu yang sudah di tentukan.

Koordinasi ini di mulai dari dalam instansi itu sendiri atau secara hirarkis seperti dari kepala suatu instansi terhadap sub bagian yang berada di dalam satu lingkup instansinya sendiri. Karena pada prinsipnya koordinasi itu untuk menyatukan dan menghubungkan satu sama lain sehingga semua kegiatan tersebut menjadi satu unit kerja yang baik. Dalam hal ini di kemukakan adanya masalah koordinasi di dalam instansi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3. Anggaran

Pengawasan dilapangan tidak didukung oleh anggaran yang tersedia, karena dalam menjalankan tugas anggaran dana sangat dibutuhkan. Namun karena hal tersebut masih ada kemungkinan personil yang berusaha untuk melakukan pungutan liar supaya kebutuhan makan dan minum dan bensin untuk kendaraan yang mereka digunakan terpenuhi.

C. PENUTUP

C1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti rangkum, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Terhadap Izin Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) dapat disimpulkan bahwa masih belum maksimalnya tugas yang instansi itu lakukan karena masih adaya instansi tersebut yang bekerja sama dengan pihak angkutan yang tidak memiliki izin trayek dan juga masih banyaknya Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang beroperasi di Kota Pekanbaru tidak memiliki izin trayek.
2. Faktor – faktor penghambat dalam melakukan pengawasan adalah :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pihak instansi hanya memiliki 8 orang personil pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) tidak memiliki izin trayek berjamuran di Kota Pekanbaru.
 - b. Koordinasi
Adanya kebocoran jadwal dan titik razia dari oknum – oknum yang tidak

bertanggung jawab, sehingga Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

c. Anggaran Dalam Melakukan Pengawasan

Anggaran yang tidak memadai sehingga ketika melakukan pengawasan ada kecurangan antara oknum dan para pelanggan.

C2. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas apaun saran dari penelti ialah :

1. Dalam melaksanakan pengawasan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seharusnya membuat laporan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan baik itu hal yang positif maupun negatif supaya untuk kedepannya ditemukan cara untuk meminimalisir jumlah Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang tidak memiliki izin trayek.
2. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru seharusnya lebih bisa memberikan tindakan keras kepada pemiliki Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP) yang tidak berizin beroperasi di Kota Pekanbaru.
3. Sebaiknya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memperbaiki koordinasi antar petugas supaya jadwal dan titik razia tidak lagi diketahui oleh pelaku Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJPD) tidak memiliki izin trayek sehingga bisa menghilangkan Angkutan yang tidak berizin beroperasi di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisamita S.A. 2011. *Perencanaan Pembangunan Transportasi*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Pendidikan Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press
- Arief, Mirriam Sjofoyan. 2010. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka
- Brantas, 2009. *Dasar – Dasar Manajemen*. Alfabeta : Bandung
- George R Terry & Leslie W. Rue, 2003, *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Penertbit Bumi Aksara
- Hasibuan Melayu S.P. 2007. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksara
- Husaini Usman , Prunomo Setiady Akbar, 2014, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- _____. 2015, *Dasar – Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
- Meleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- _____. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kamaludin, 2003. *Ekonomi Transportasi*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Miro, 2005. *Perencanaan Transportasi*, Jakarta : Erlangga
- Moh, Nazir. 2005 , *Metode Penelitian* , Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Murhaini, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Salim ,Abbas, 1993. *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada
- Siagian. S. P. 2006. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujanto. 1983. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sarundajang, 2005. *Sistem Pemerintahan Daerah : Kata Hasta*
- Suriansyah Muhairini, 2014, *Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryabrata Sumadai. 2008, *Metodologi Penelitian*, Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Usman, Husaini & Akbar, Prunomo Setiady. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yahya Yohannes, 2006, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan
- Keputusan Menteri Perhubungan No 35 Tahun 2017
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Pekanbaru
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kota
Pekanbaru

Jurnal

- Karongkong Hendriek, dkk. *Analisis Pelayanan Transportasi Angkutan Kota Di Kota Ternate*, Universitas Sam Ratulangi Manado
- Lubis. H. dkk. 2005. *Persepsi Pelaku Perjalanan Terhadap Pelayanan Angkutan Umum Di Kota Medan*, Vol. 02 No. 03
- Nadyasari,2015. *Implementasi Kebijakan Terhadap Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (Travel) Di Kota Pekanbaru*, JOM FISIP, Vol 2 , No 2
- Rauf. S. 2013. *Analisis Kinerja Dan Pemetaan Angkutan Umum (Mikrolet) di Kota Makasar (Studi Kasus: Angkutan Kota Trayek A,C,G,J,S) (135t)*, Vol 07, No 07
- Rezi Pramata,2017, *Penertiban Angkutan Antar Jemput Di Provinsi Riau (Studi Kasus Kota Pekanbaru)*, JOM FISIP,Vol. 4 , No.2